

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

2021



<https://acehbarat.bps.go.id>



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT

2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT 2021

No, Publikasi : 11070.2121

Katalog BPS : 4102004.1107

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 70 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Mughlisuddin, S.E.

Penyunting:

Yulia Geubrina, SST

Penulis:

Dhia Ulfakhirah, S.Tr.Stat

Pengolah Data:

Dhia Ulfakhirah, S.Tr.Stat

Gambar Kulit:

Firmansyah, SE

KATA PENGANTAR

Kesejahteraan pada dasarnya mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan tidak semua aspek dapat diukur. Menyadari keterbatasan tersebut, publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Bidang-bidang tersebut adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga lainnya.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat 2021 merupakan publikasi yang menyajikan data tentang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020, dan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna data.

Meulaboh, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Aceh Barat


Mughlisuddin, SE

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
TIM PENYUSUN	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR	<i>v</i>
DAFTAR ISI	<i>vii</i>
DAFTAR TABEL	<i>ix</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>x</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Sumber Data	5
2.2. Metode Pengumpulan Data	5
2.3. Metode Analisis	5
2.4. Konsep dan Definisi	6
BAB III KEPENDUDUKAN	13
3.1. Gambaran Kabupaten Aceh Barat Secara Umum	13
3.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	15
3.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	15
3.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan	17
3.5. Administrasi Kependudukan	19
BAB IV KETENAGAKERJAAN	23
4.1. Penduduk Usia Kerja	24
4.2. Angkatan Kerja	26
4.2.1 Kelompok Umur Angkatan Kerja	26
4.2.2 Angkatan Kerja dan Pendidikan	27
4.3. Bekerja	29
4.3.1 Kelompok Umur Penduduk Bekerja	29
4.3.2 Bekerja dan Pendidikan	30
4.3.3 Lapangan Usaha Penduduk Bekerja	30
4.3.4 Status Usaha Penduduk Bekerja	31
4.4. Pengangguran	32
BAB V KESEHATAN	35
5.1. Angka Kesakitan	36
5.2. Penolong Kelahiran	37
5.3. Pemberian ASI	38
5.4. Imunisasi	39

BAB VI	PENDIDIKAN	41
	6.1. Status Pendidikan	41
	6.2. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	42
	6.3. Angka Melek Huruf	43
	6.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	44
	6.5. Angka Partisipasi Murni (APM)	45
BAB VII	KELUARGA BERENCANA	47
	7.1. Status Perkawinan	47
	7.2. Wanita Berstatus Kawin dan Alat/Cara KB yang Digunakan	48
BAB VIII	PERUMAHAN	51
	8.1. Status Kepemilikan Rumah	51
	8.2. Aset	52
	8.3. Sumber Air	53
	8.4. Tempat Buang Air Besar	54
BAB IX	KONSUMSI DAN PENGELUARAN	57
	9.1. Pengeluaran Konsumsi Kelompok Makanan	59
	9.2. Pengeluaran Konsumsi Kelompok Non Makanan	60
BAB X	KEMISKINAN	63
	10.1. Garis Kemiskinan	63
	10.2. Persentase Kemiskinan	65
BAB XI	SOSIAL EKONOMI LAINNYA	67
	11.1. Perlindungan Sosial	67
	11.1.1 Jaminan Sosial	67
	11.1.2 Jaminan Pendidikan	68
	11.2. Teknologi Informasi	68

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>	
Tabel	3.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	13
Tabel	3.2.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat, 2020	15
Tabel	3.3.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2010-2020	16
Tabel	3.4.	Persentase Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat, 2010-2020	19
Tabel	4.1.	TPAK, TKK, dan TPT di Kabupaten Aceh Barat, 2020	24
Tabel	4.2.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Aceh Barat, 2020	26
Tabel	5.1.	Persentase Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI, 2021	38
Tabel	6.1.	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat, 2021	42
Tabel	6.2.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Aceh Barat, 2021	43
Tabel	6.3.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca/menulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, 2021	43
Tabel	6.4.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, 2021	44
Tabel	6.5.	Angka Partisipasi Murni Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat, 2021	45
Tabel	7.1.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Aceh Barat, 2021	48
Tabel	11.1.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Penggunaan Telepon Seluler/Komputer dan Mengakses Internet di Kabupaten Aceh Barat, 2021	69

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Barat, 2020	18
Gambar 3.2. Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Aceh Barat (%), 2021	20
Gambar 4.1. Persentase Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Aceh Barat, 2020	25
Gambar 4.2. Piramida Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Barat, 2020	27
Gambar 4.3. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	28
Gambar 4.4. Piramida Penduduk Bekerja Kabupaten Aceh Barat, 2020	29
Gambar 4.5. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	30
Gambar 4.6. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat, 2020	31
Gambar 4.7. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat, 2020	32
Gambar 4.8. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	33
Gambar 5.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, 2021	36
Gambar 5.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan di Kabupaten Aceh Barat, 2021	36
Gambar 5.3. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dengan Penolong Kelahiran Tenaga Kesehatan di Kab. Aceh Barat, 2021	37
Gambar 5.4. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Kab. Aceh Barat, 2021	38
Gambar 5.5. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imnisasi Menurut Jenisnya di Kab. Aceh Barat, 2021	39
Gambar 7.1. Persentase Wanita Berusia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin dan Penggunaan Alat KB di Kabupaten Aceh Barat, 2021	49
Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Aceh Barat, 2021	52
Gambar 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Fasilitas Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat, 2021	52
Gambar 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Transportasi di Kabupaten Aceh Barat, 2021	52

Gambar 8.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll. di Kabupaten Aceh Barat, 2021	53
Gambar 8.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Aceh Barat, 2021	54
Gambar 9.1.	Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Aceh Barat, 2021	57
Gambar 9.2.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Aceh Barat (Rupiah), 2021	58
Gambar 9.3.	Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Komoditas Makanan Terpilih di Kabupaten Aceh Barat, 2016-2021	60
Gambar 9.4.	Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat, 2016-2021	61
Gambar 10.1.	Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat (Rupiah), 2012-2021	64
Gambar 10.2.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat, 2012-2021	65
Gambar 11.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Aceh Barat, 2021	67
Gambar 11.2.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar di Kabupaten Aceh Barat, 2021	68

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari berbagai indikator, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan serta pendapatan masyarakat dan ketenagakerjaan.

Data sosial ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat sangat diperlukan untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 menggambarkan data dan informasi mengenai tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun ulasan-ulasan singkat.

1.2. Tujuan

Secara umum pengumpulan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bertujuan untuk mendapatkan indikator-indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan rakyat atau tingkat sosial ekonomi masyarakat serta keadaan ketenagakerjaan. Sasaran pengumpulan data pokok pada Susenas adalah tersedianya data tentang kesejahteraan rakyat, dimana sejak tahun 1992 data pokok tersebut telah dapat disajikan tidak hanya sampai tingkat provinsi tapi

juga sampai tingkat kabupaten/kota. Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan atau para peneliti di bidang sosial/kesejahteraan rakyat.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan Susenas 2021 dan Sakernas 2020 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan pendekatan sampel rumah tangga. Sampel rumah tangga Susenas dan Sakernas di Kabupaten Aceh Barat tersebar di dua belas kecamatan. Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus (seperti asrama, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan) dan rumah tangga khusus yang tinggal dalam blok sensus biasa tidak dipillih dalam sampel.

Dalam kegiatan Susenas tahun 2021, seluruh rumah tangga sampel dicacah dengan menggunakan Daftar VSEN21.K yang berisi tentang keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga serta VSEN21.KP yang berisi tentang pengeluaran rumah tangga baik makanan maupun non makanan. Sementara itu, rumah tangga sampel dalam kegiatan Sakernas tahun 2020 dicacah dengan menggunakan Daftar SAK20.AK untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan. Data yang dihasilkan dari sampel Susenas dan Sakernas cukup representatif untuk disajikan hingga tingkat kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, disajikan dalam 11 bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan,
2. Bab II Metodologi,
3. Bab III Kependudukan,
4. Bab IV Ketenagakerjaan,
5. Bab V Kesehatan,
6. Bab VI Pendidikan,

7. Bab VII Keluarga Berencana,
8. Bab VIII Perumahan,
9. Bab IX Konsumsi dan Pengeluaran,
10. Bab X Kemiskinan,
11. Bab XI Sosial Ekonomi Lainnya.

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



BAB II METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber data utama publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2020 dan Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 di Kabupaten Aceh Barat.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas 2021 dan Sakernas 2020 yang ditujukan pada individu perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan dapat diwawancarai. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.

2.3. Metode Analisis

Data yang dibahas dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat ini meliputi data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, perumahan, konsumsi, dan sosial ekonomi lainnya yang bersifat umum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Analisis yang dilakukan mencoba memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 yang bersifat sederhana dan deskriptif terhadap tabel maupun grafik yang tersedia.

2.4. Konsep dan Definisi

a. Penduduk

Tingkat Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase.

Kepadatan Penduduk yaitu rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio Jenis Kelamin adalah banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita.

Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di rumah tangga tersebut.

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan akan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami/isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh

isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

b. Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan, kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Mengobati sendiri adalah upaya oleh anggota rumah tangga/keluarga dengan melakukan pengobatan sendiri **tanpa** mendatangi fasilitas kesehatan atau memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya (misal minum obat modern, jamu, kerokan, kompres, pijat) agar sembuh atau menjadi lebih ringan keluhan kesehatannya.

Rawat jalan atau **berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksa atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien.

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum pencacahan.

c. Pendidikan

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di sekolah formal.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio anak yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu pada usia sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Putus Sekolah adalah rasio jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang putus sekolah terhadap jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

d. Fertilitas dan KB

Anak lahir hidup anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun mungkin hanya beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernafas dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut **lahir mati**.

Metode kontrasepsi yaitu cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor) yaitu orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.

Alat/cara KB adalah alat/cara yang digunakan pasangan suami istri untuk mencegah atau menunda kehamilan yang terdiri dari alat/cara KB modern dan tradisional.

Alat/cara KB modern meliputi Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi, Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi, AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)/IUD (*Intra Uterus Device*)/Spiral, Suntikan KB, Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit, Pil KB, Kondom/karet KB, dan Tissue Intravag/kondom wanita.

Alat/cara KB tradisional antara lain pantang berkala/sistem kalender, senggama putus, dan cara tradisional lainnya (tidak campur/puasa, jamu dan urut).

Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi adalah operasi yang dilakukan pada wanita, yaitu mengikat saluran telur untuk mencegah terjadinya kehamilan dimaksudkan agar wanita tersebut tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung telur yang dilakukan karena alasan-alasan lain, bukan untuk mencegah wanita mempunyai anak lagi tidak termasuk sterilisasi.

Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi adalah suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya.

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)/IUD (*Intra Uterus Device*)/Spiral adalah alat dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, T, kipas dan lainnya, dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Suntikan KB adalah salah satu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu ke dalam tubuh, misalnya satu, tiga, atau enam bulan sekali.

Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit (alat kontrasepsi bawah kulit) adalah enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pil KB adalah pil yang diminum untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus diminum secara teratur setiap hari.

Kondom/karet KB adalah alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar istrinya/pasangannya tidak menjadi hamil.

Tissue Intravag/kondom wanita adalah tisu KB yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kumpul.

e. Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak diperhitungkan sebagai luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).

Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami di bawahnya dari teriknya matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Sumber air minum adalah sumber dari air yang digunakan untuk keperluan minum anggota rumah tangga.

Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum)

Air sumur terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut sumur.

Kloset leher angsa adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.

Lainnya adalah yang tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk tidak mempunyai jamban/kakus.

f. Sosial lainnya

Pengeluaran adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang berupa makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

g. Ketenagakerjaan

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok bekerja dan kelompok pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam berturut-turut/tidak putus selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan (*discourage worker*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angkatan kerja wanita, usia muda dan usia tua sering menjadi fokus dalam analisis pasar kerja di suatu negara atau wilayah, disamping mereka yang digolongkan sebagai angkatan kerja prima/utama (*prime age*), yaitu usia 25-54 tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. Tingkat kesempatan kerja diukur sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

BAB III KEPENDUDUKAN



3.1. Gambaran Kabupaten Aceh Barat Secara Umum

Kabupaten Aceh Barat secara geografis terletak diantara $04^{\circ}06'-04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}52'-96^{\circ}30'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,97 Km². Ibu kota kabupaten ini adalah Meulaboh yang terletak di Kecamatan Johan Pahlawan. Kecamatan terluas adalah Sungai Mas dengan proporsi 26,70 persen dari wilayah Aceh Barat, sedangkan kecamatan terkecil adalah Johan Pahlawan dengan proporsi 1,53 persen dari luas wilayah Aceh Barat.

Tabel 3.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Johan Pahlawan	44,91	1,53
Samatiga	140,69	4,81
Bubon	129,58	4,43
Arongan Lambalek	130,06	4,44
Woyla	249,04	8,51
Woyla Barat	123,00	4,20
Woyla Timur	132,60	4,53
Kaway XVI	510,80	17,42
Meureubo	112,87	3,85
Pante Ceureumen	490,25	16,74
Panton Reu	83,04	2,84
Sungai Mas	781,73	26,70
Aceh Barat	2.927,95	100,00

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie di sebelah utara dan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Sedangkan pada sebelah timur, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah. Sementara Samudera Hindia membujur di sepanjang barat daerah ini.

Secara administrasi, Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan, 33 mukim dan 322 gampong. Kecamatan terdekat dari pusat kota Meulaboh adalah Meureubo, Samatiga, dan Kaway XVI. Sementara kecamatan terjauh adalah Woyla Timur, Panton Reu, dan Sungai Mas.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan.

Jumlah/komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menggambarkan kuatnya tekanan terhadap kesejahteraan rumah tangga, yang pada akhirnya akan membebani tingkat perekonomian rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Ketersediaan data kependudukan yang berkualitas menentukan arah perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Dari segi perencanaan, data ini dapat menjadi dasar untuk menyusun program pembangunan guna memenuhi fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, misalnya fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan masyarakat, tempat ibadah, tempat rekreasi dan lainnya. Sedangkan dari segi evaluasi, data ini dapat menjadi gambaran sampai

sejauh mana program yang terkait dengan kependudukan sudah berjalan, seperti: Program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk menekan/mengurangi jumlah kelahiran, Program Wajib Belajar maupun program lain yang berkaitan dengannya. Pada bagian ini, data kependudukan yang disajikan adalah data tentang jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk menurut umur berdasarkan sensus penduduk di tahun 2020.

3.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat adalah 198.736 jiwa yang tersebar di dua belas kecamatan. Penduduk laki-laki berjumlah 100.492 jiwa dan perempuan 98.244 jiwa, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 102,30. Ini berarti penduduk laki-laki di Aceh Barat lebih banyak 2,30 persen dibandingkan penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 sebesar 1,32 persen (Tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat, 2020

Indikator	2020
(1)	(2)
Luas Wilayah (Km ²)	2.927,95
Jumlah Penduduk (jiwa)	198.736
- Laki-laki	100.492
- Perempuan	98.244
Rasio Jenis Kelamin	102,30
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,32

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

3.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk antar kecamatan terlihat masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terkonsentrasi di pusat perekonomian yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk. Masalah

yang sering timbul akibat kepadatan penduduk pada umumnya berhubungan dengan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, seperti memprioritaskan pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang masih terisolir dan kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2010–2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
	2010	2020	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Johan Pahlawan	56.050	64.646	1.248	1.439
Samatiga	13.322	15.656	95	111
Bubon	6.545	6.817	51	53
Arongan Lambalek	10.609	11.871	82	91
Woyla	12.073	13.576	48	55
Woyla Barat	6.858	7.837	56	64
Woyla Timur	4.138	5.144	31	39
Kaway XVI	18.753	21.216	37	42
Meureubo	26.510	30.066	235	266
Pante Ceureumen	9.635	11.133	20	23
Panton Reu	5.671	6.856	68	79
Sungai Mas	3.394	4.188	4	5
Aceh Barat	173.558	198.736	59	68

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010 dan 2020

Persebaran penduduk di Kabupaten Aceh Barat terkonsentrasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo dan Kaway XVI dengan persentase masing-masing sebesar 32,53 persen, 15,13 persen, dan 10,68

persen. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kecamatan Sungai Mas dengan jumlah penduduk sebanyak 4.188 jiwa.

Kecamatan Johan Pahlawan yang luasnya hanya 44,91 km² (1,53 persen dari total luas Kabupaten Aceh Barat), merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk mencapai 1.439 jiwa per km² tahun 2020 dan 1.248 jiwa per km² pada tahun 2010. Kecamatan Sungai Mas merupakan daerah terjarang penduduknya dengan kepadatan penduduk 5 jiwa per km² pada tahun 2020 dan 4 jiwa per km² pada tahun 2010 (Tabel 3.3.).

3.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan

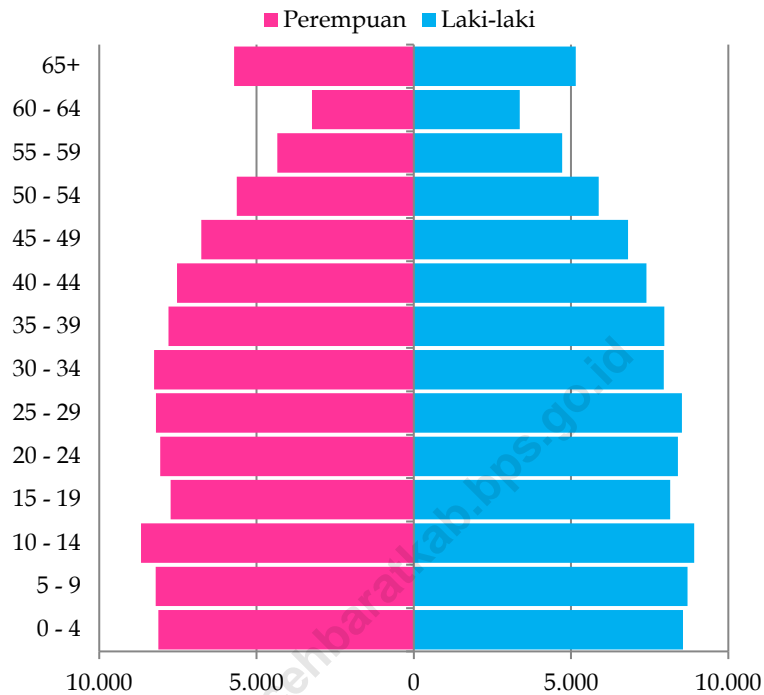
Dari struktur umur penduduk di suatu daerah, dapat diketahui apakah penduduk di wilayah tersebut berstruktur umur muda atau berstruktur umur tua. Dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35 persen), dan besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun keatas lebih kurang 3 persen. Sebaliknya dikatakan berstruktur umur tua apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35 persen dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk diatas 65 tahun sekitar 15 persen (Mantra, 1985).

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan penduduk masa yang akan datang.

Piramida penduduk Kabupaten Aceh Barat 2020 seperti yang disajikan pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada pada kelompok umur dibawah 5 tahun cenderung berkurang karena penurunan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Aceh Barat sudah cukup rendah. Dengan demikian, perlu

dipertahankan upaya dari pemerintah dalam menekan angka kelahiran, seperti dengan menggalakkan program KB dan menunda usia perkawinan pertama.

Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Tabel 3.4., penduduk Kabupaten Aceh Barat sebagian besar berada pada kelompok umur produktif atau masih tergolong struktur umur muda, yaitu 68,78 persen. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (dibawah 15 tahun) sebesar 25,75 persen pada tahun 2020 serta penduduk umur 65 tahun keatas sebesar 5,47 persen. Salah satu penyebab Kabupaten Aceh Barat memiliki proporsi penduduk produktif yang cukup tinggi karena merupakan wilayah dengan sarana dan prasarana yang lebih baik diantara kabupaten/kota dalam kawasan pantai barat selatan Aceh, sehingga mendorong terjadinya perpindahan penduduk usia produktif dari wilayah lain ke Aceh Barat, khususnya di Meulaboh. Hal ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil,

mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi dan tantangan ke depan pada era perdagangan bebas dan globalisasi.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat, 2010-2020

Kelompok Umur	2010	2020
(1)	(2)	(3)
0-14 tahun	50.743	51.175
15-64 tahun	116.558	136.696
≥ 65 tahun	6.257	10.865
Jumlah	173.558	198.736
Angka Beban Ketergantungan	48,90	45,39

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

Untuk mengetahui sejauh mana besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif terhadap penduduk non produktif, dapat dilihat dari angka rasio beban ketergantungan baik anak-anak (0-14 tahun) maupun lansia (≥ 65 tahun). Tabel 3.4. memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat sebesar 45,39 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif.

Selama periode 2010-2020, angka beban ketergantungan mengalami penurunan dari 48,90 menjadi 45,39 persen. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

3.5 Administrasi Kependudukan

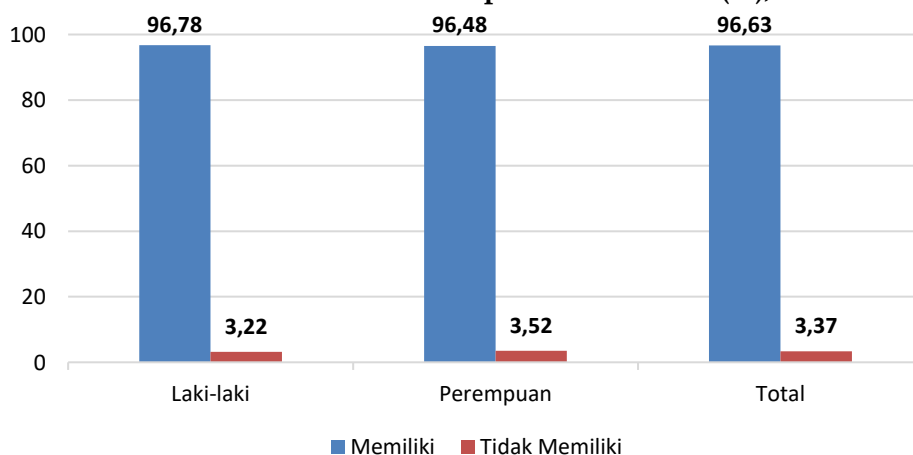
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Pada tahun 2021, 99,24 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat berumur 17 tahun ke atas telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Gambar 3.2 Penduduk Berumur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Aceh Barat (%), 2021



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Salah satu dokumen wajib kependudukan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak berlandaskan undang-undang dan dapat pula dipertanggungjawabkan keasliannya.

Pada tahun 2021, masih terdapat 3,37 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat berumur 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Lebih banyak penduduk laki-laki yang memiliki akta kelahiran dibandingkan penduduk perempuan, masing-masing 96,78 persen dan 96,48 persen.



BAB IV KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan tiga pilar sekaligus, yakni pemerintah, buruh, dan dunia usaha. Dalam konteks itu, pemerintah berkepentingan agar iklim ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan aliran investasi, meningkatkan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, buruh berkepentingan dalam soal kesejahteraan, terutama pengupahan, pesangon, dan jam kerja. Sebaliknya, dunia usaha berkepentingan dalam hal efisiensi melalui pengurangan biaya operasional perusahaan yang kerap menyasar pengeluaran untuk buruh, seperti upah dan pesangon.

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini cukup kompleks. Permasalahan tersebut terutama bersumber dari banyaknya “supply” tenaga kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia maupun produktivitas kerja yang berimplikasi pada masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menyerap angkatan kerja tidaklah sebaik apa yang diharapkan.

Angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk laki-laki, yakni sebesar 80,02 persen (Tabel 4.1.). Hal ini tidak terlepas dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk laki-laki yang jauh di atas TPAK penduduk perempuan. Meski TPAK Aceh Barat di tahun 2020 mencapai 59,41 persen, namun TPAK penduduk perempuan hanya 38,13 persen.

Tabel 4.1 TPAK, TKK dan TPT di Kabupaten Aceh Barat, 2020

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,02	38,13	59,41
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,15	93,90	92,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,85	6,09	7,30

Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020

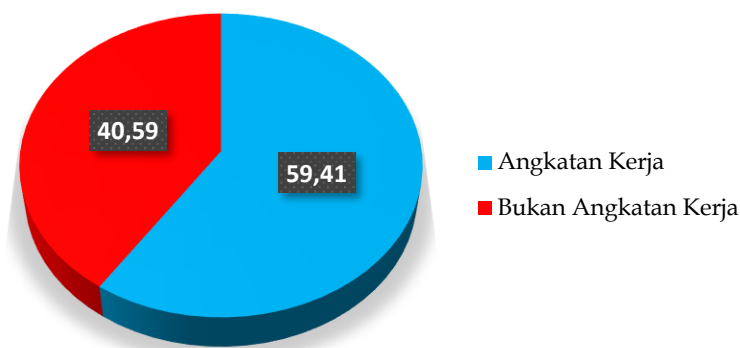
Meskipun TPAK jauh di bawah penduduk laki-laki, nyatanya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) penduduk perempuan masih lebih baik dibandingkan TKK penduduk laki-laki. TKK perempuan sebesar 93,90 persen yang menunjukkan bahwa 93,90 persen penduduk perempuan yang memasuki dunia kerja di tahun 2020 dalam posisi bekerja, bukan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan sebagai angka pengangguran di suatu wilayah untuk Kabupaten Aceh Barat di tahun 2020 sebesar 7,30 persen. TPT penduduk laki-laki lebih besar daripada TPT penduduk perempuan (7,85 persen terhadap 6,09 persen) karena umumnya tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga sejatinya ada di pundak laki-laki sebagai kepala keluarga sehingga proporsi dalam mencari pekerjaan lebih didominasi oleh laki-laki.

4.1 Penduduk Usia Kerja

Terdapat 156.331 orang penduduk usia kerja yakni mereka yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020. Jumlah itu mencakup 78,67 persen dari populasi penduduk Kabupaten Aceh Barat. Tidak seluruh penduduk memilih untuk menjadi bagian dari angkatan kerja. Ada yang melakukannya dengan alasan masih sekolah, mengurus rumah tangga, ataupun atas alasan pribadi lainnya.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020

Pada dasarnya, penduduk yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- Angkatan kerja potensial (*potential labour force*), mencakup mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, namun belum bersedia/siap untuk segera memulai suatu pekerjaan; dan tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, namun mengaku bersedia/siap untuk segera memulai suatu pekerjaan. Termasuk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa).
- Penduduk yang menginginkan suatu pekerjaan namun tidak sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha dan mengaku saat ini belum bersedia/siap untuk segera memulai suatu pekerjaan.
- Penduduk yang tidak menginginkan pekerjaan.

Dari sejumlah 156.331 orang penduduk usia kerja yakni mereka yang berumur 15 tahun ke atas, sebanyak 92.879 orang (59,41 persen) merupakan bagian dari angkatan kerja sedangkan sebanyak 63.452 orang (40,59 persen) bukan bagian dari angkatan kerja.

Dari sejumlah 63.452 orang penduduk usia kerja yang memilih menjadi bukan bagian dari angkatan kerja dengan alasan sekolah sebanyak 16.383 orang (25,82 persen), dengan alasan mengurus rumah tangga sebanyak 38.566

orang (60,78 persen), sedangkan sebanyak 8.503 orang (13,40 persen) tergolong ke dalam bukan angkatan kerja dengan alasan kegiatan lainnya (pensiun, kegiatan selain tidur, dll).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Aceh Barat, 2020

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	63.551	29.328	92.879
Bekerja	58.562	27.540	86.102
Pengangguran	4.989	1.788	6.777
Bukan Angkatan Kerja	15.870	47.582	63.452
Sekolah	7.016	9.367	16.383
Mengurus Rumah Tangga	3.279	35.287	38.566
Lainnya	5.575	2.928	8.503
Penduduk Usia Kerja	79.421	76.910	156.331

Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020

Jumlah penduduk laki-laki yang memilih menjadi bagian dari angkatan kerja 2,17 kali lipat penduduk perempuan. Sebaliknya, jumlah penduduk perempuan yang memilih bukan menjadi bagian dari angkatan kerja hampir tiga kali lipat penduduk laki-laki. 74,16 persen di antara perempuan tersebut memilih alasan mengurus rumah tangga daripada terlibat dalam dunia kerja (Tabel 4.2.).

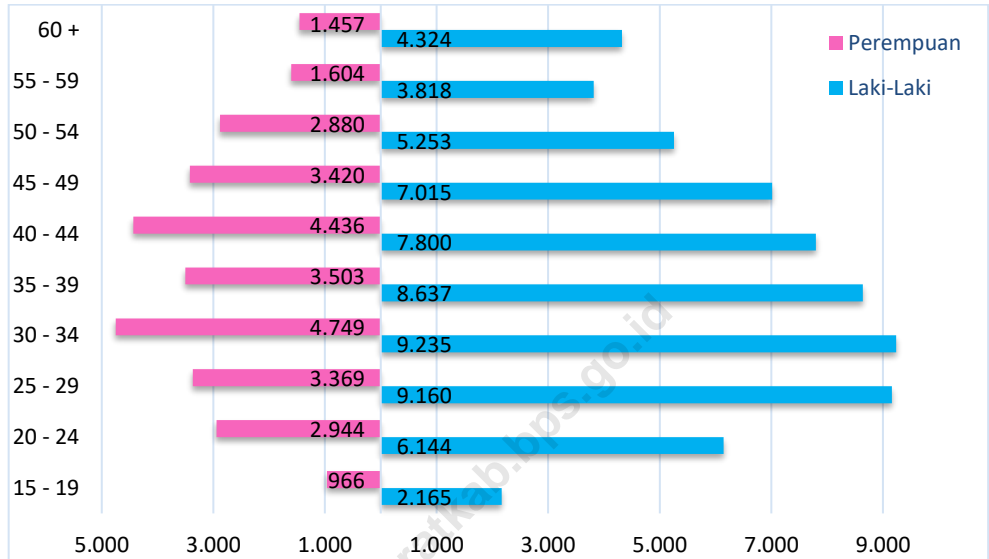
4.2 Angkatan Kerja

4.2.1 Kelompok Umur Angkatan Kerja

Berdasarkan Gambar 4.2. menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat timpang lebih berat ke arah penduduk laki-laki. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa angkatan kerja terbesar berada pada kelompok umur 30-34 tahun. Terdapat 9.235 laki-laki atau 9,94 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 berada dalam kelompok umur ini. Pada kelompok umur ini, umumnya mereka sudah

memasuki dunia kerja. Sama halnya dengan penduduk perempuan, angkatan kerja terbesar berada dalam kelompok umur 30-34 tahun.

Gambar 4.2 Piramida Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020

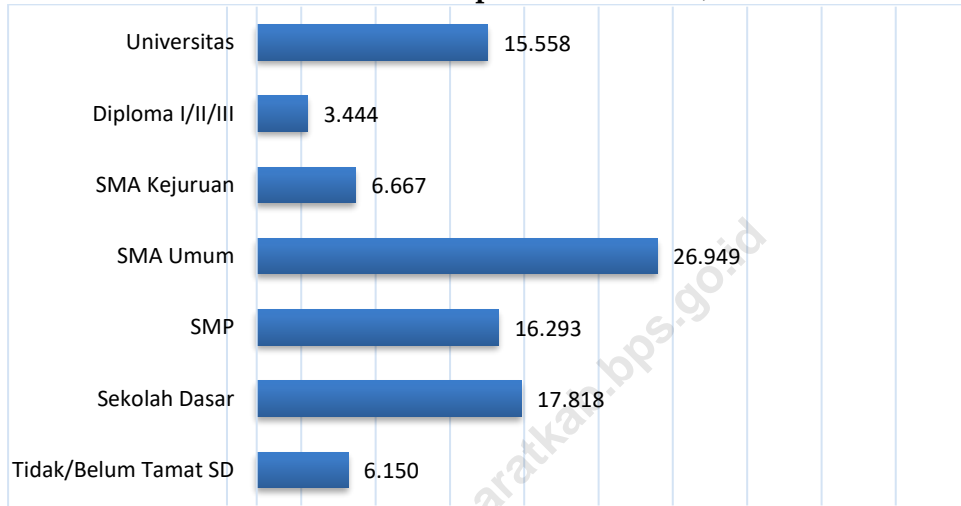
Semakin bertambah umur, angkatan kerja pun cenderung menunjukkan semakin berkurang baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Jumlah angkatan kerja pemula (umur 15-19 tahun) relatif lebih kecil dibandingkan jumlah angkatan kerja manula (umur 60+). Hal ini dikarenakan pada rentang usia 15-19 tahun mayoritas penduduknya masih mengenyam pendidikan sekolah/kuliah. Di sisi lain, angkatan kerja penduduk perempuan dalam kelompok umur 50-59 tahun lebih sedikit dibandingkan kelompok umur 20-29 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan memilih untuk lebih cepat meninggalkan dunia kerja dibandingkan penduduk laki-laki.

4.2.2 Angkatan Kerja dan Pendidikan

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan kualitas angkatan kerja yang baik. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal

harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Hal ini bisa terjadi bila mutu angkatan kerja yang ada tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan dunia usaha.

Gambar 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan dan latihan negara tersebut. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang minim pula. Imbasnya adalah produktivitas tenaga kerja menjadi rendah sehingga berpengaruh terhadap minimnya capaian kualitas hasil produksi barang dan jasa.

Dapat dilihat pada Gambar 4.3, Sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 masih berpendidikan SMA Umum, yakni sebanyak 26.949 orang atau 29,02 persen. Sementara itu, angkatan kerja lulusan Sekolah Dasar menjadi jumlah terbesar kedua, yakni sebanyak 17.818 orang atau 19,18 persen. Besarnya angka ini menjadi dorongan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sektor pendidikan.

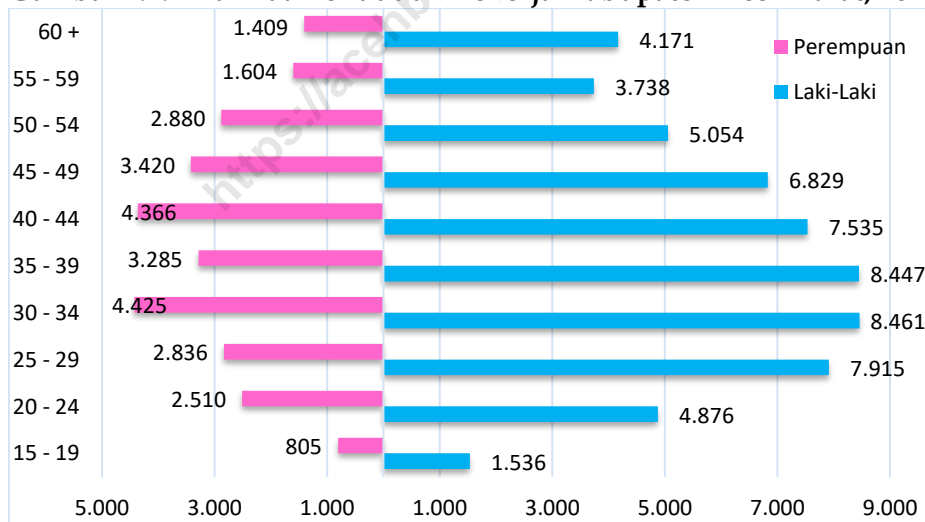
Angkatan kerja lulusan SMP menempati posisi ketiga jumlah angkatan kerja di atas lulusan Universitas dan SMA Kejuruan. Selain itu, patut dicermati bahwa angkatan kerja lulusan SMA kejuruan hampir sama banyaknya dengan angkatan kerja yang tidak/belum tamat SD yaitu sekitar 6-7 persen.

4.3 Bekerja

4.3.1 Kelompok Umur Penduduk Bekerja

Dapat dilihat pada Gambar 4.4 bahwa piramida penduduk bekerja sangat timpang dan lebih berat sebelah ke arah penduduk laki-laki. Selain itu, penduduk yang bekerja paling banyak berada dalam rentang umur 30-34 tahun. Terdapat 12.886 orang atau 14,97 persen dari penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 pada kelompok umur tersebut. Tercatat 65,66 persen dari mereka yang bekerja pada rentang umur ini adalah laki-laki.

Gambar 4.4. Piramida Penduduk Bekerja Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020

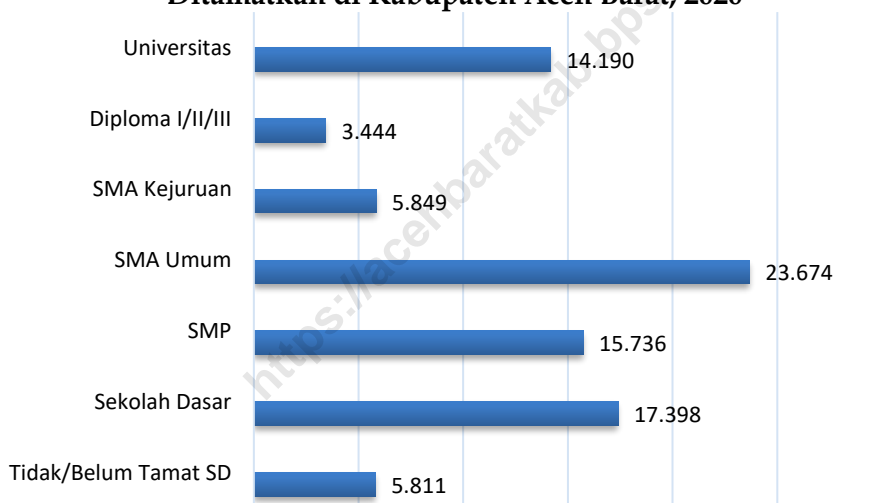
Seperti halnya piramida angkatan kerja, semakin bertambah umur penduduk maka semakin sedikit pula jumlah penduduk yang bekerja. Selain itu, semakin banyak angkatan kerja pada suatu kelompok umur, maka semakin

banyak pula penduduk yang bekerja. Hal tersebut berlaku baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan.

4.3.2 Bekerja dan Pendidikan

Seiring dengan banyaknya angkatan kerja lulusan SMA Umum dan Sekolah Dasar (SD), jumlah penduduk bekerja terbesar pun merupakan lulusan SMA Umum dan Sekolah Dasar. Tercatat 23.674 pekerja merupakan lulusan SMA Umum dan 17.398 pekerja merupakan tamatan SD. Lulusan kedua jenjang tersebut mencapai 47,70 persen dari penduduk yang bekerja.

Gambar 4.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020



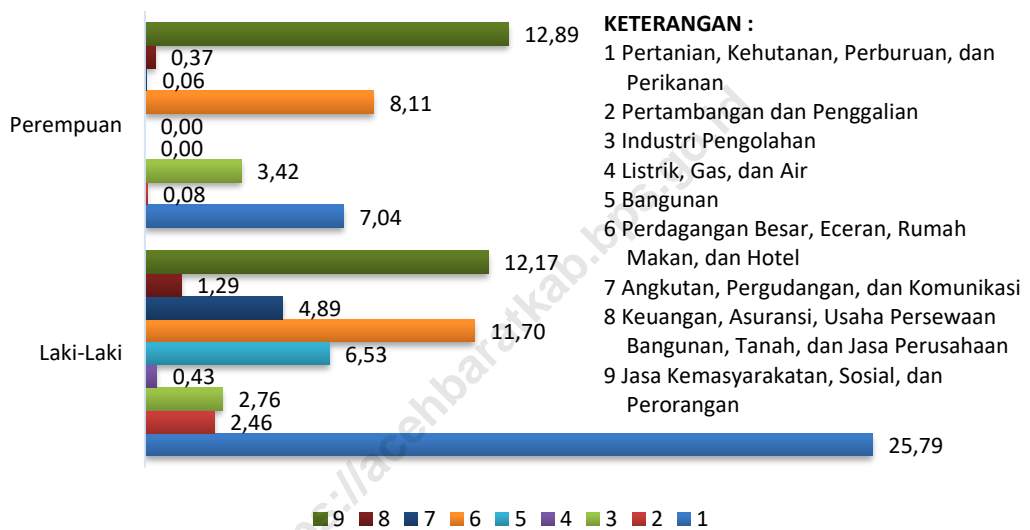
Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

4.3.3 Lapangan Usaha Penduduk Bekerja

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber perekonomian. Sektor ini didominasi oleh pekerja yang bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan. Selanjutnya Aceh Barat juga unggul pada lapangan usaha jasa-jasa sebagai penggerak roda ekonomi. Meulaboh, ibu kota dari Kabupaten Aceh Barat merupakan sentra ekonomi untuk wilayah pantai barat selatan Aceh sehingga tidak jarang kita lihat beberapa perwakilan instansi vertikalnya ada di wilayah ini. Selain itu,

Meulaboh juga dapat dikatakan sebagai pusat kota pendidikan karena terdapat Universitas terbesar di pantai barat selatan Aceh, yakni Universitas Teuku Umar. Perusahaan swasta besar dan skala nasional pun membuka kantor cabang dan perwakilan di kota ini. Juga terdapat Mall Pusat Perbelanjaan di kota ini.

Gambar 4.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat (persen), 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020

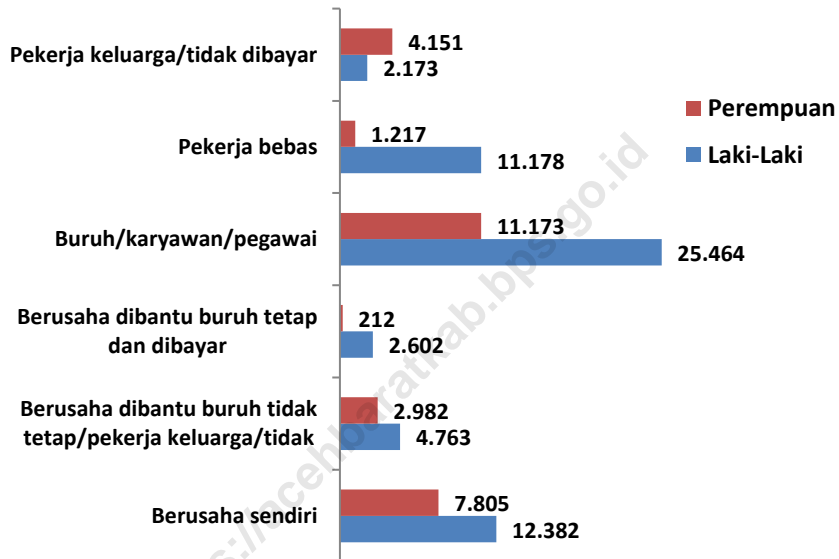
Apabila dilihat berdasarkan karakteristiknya, baik pekerja laki-laki maupun perempuan di sektor pertanian memiliki proporsi yang seimbang yakni sekitar 12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang pekerjaan pada lapangan usaha ini tidak membedakan kemampuan gender. Sementara itu, pekerja yang bergerak di sektor jasa mayoritas diisi oleh laki-laki. Tercatat tenaga kerja laki-laki yang terserap pada lapangan usaha ini hampir empat kali lebih besar dibandingkan tenaga kerja perempuan.

4.3.4 Status Usaha Penduduk Bekerja

Secara umum penduduk Kabupaten Aceh Barat yang bekerja merupakan buruh dan pengusaha. Tercatat 42,55 persen atau sebanyak 36.637

pekerja yang berstatus usaha sebagai buruh sedangkan 35,71 persen atau 30.746 orang merupakan pengusaha, baik mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, ataupun berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar.

Gambar 4.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020

Apabila dilihat menurut karakteristiknya, pekerja laki-laki lebih dominan untuk beberapa status pekerjaan utama, kecuali pada pekerja keluarga/tidak dibayar. Hal ini terjadi karena umumnya pekerja keluarga di Aceh Barat merupakan istri dari kepala rumah tangga yang bekerja sebagai petani atau pedagang.

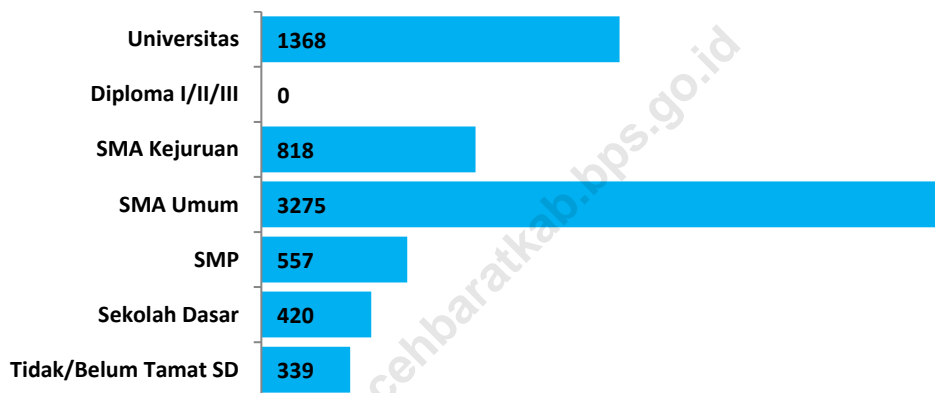
4.3.1 Pengangguran

Jumlah pengangguran terbesar berada pada lulusan SMA Umum dan Universitas. Dengan kata lain, Aceh Barat didominasi oleh pengangguran terdidik. Tingginya jumlah penganggur ini kemungkinan disebabkan mereka masih ingin menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan

latar belakang pendidikannya sehingga ada kecenderungan dalam memilih jenis pekerjaan.

Sementara itu, penduduk Aceh Barat dengan lulusan Diploma I/II/III tidak ada yang bersatus menganggur. Hal ini terjadi kemungkinan karena mereka cenderung lebih terampil dan siap pakai untuk mengisi lapangan pekerjaan.

Gambar 4.8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Sakernas 2020



BAB V

KESEHATAN

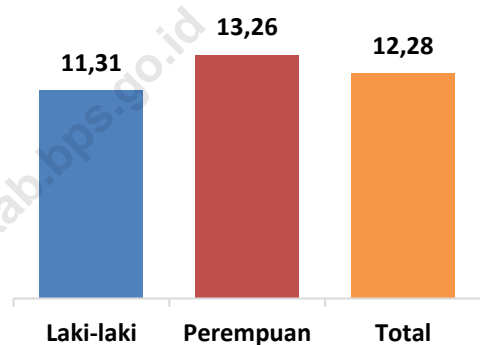
Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Derajat kesehatan penduduk antara lain dapat diukur dengan angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya pembangunan di suatu daerah karena hal tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara fisik maupun mental. Daerah yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi derajat kesehatan dapat diartikan semakin baik kualitas sumber daya manusia, terlebih bila dihubungkan dengan kesehatan ibu dan anak.

5.1 Angka Kesakitan

Informasi status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum pencacahan. Semakin banyak penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, menunjukkan bahwa derajat kesehatan di suatu daerah masih rendah, demikian juga sebaliknya, apabila angka kesakitan penduduk rendah menunjukkan derajat kesehatan di daerah tersebut sudah semakin baik. Angka kesakitan ini dapat dicerminkan oleh banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan berdasarkan jenis keluhan yang dideritanya.

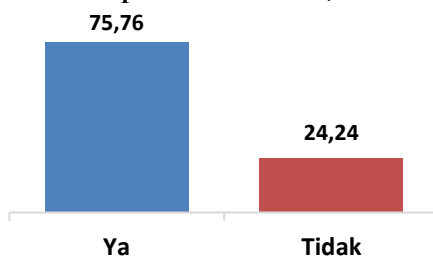
Gambar 5.1.
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, 2021



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Pada Gambar 5.1. di atas, persentase penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 yang mengalami gangguan kesehatan lebih sedikit dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 11,31 persen dan 13,26 persen.

Gambar 5.2.
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan di Kabupaten Aceh Barat, 2021



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang menjalani rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan. Penerbitan kartu pelayanan kesehatan secara gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di bidang kesehatan. Dari Gambar 5.2.,

tampak bahwa 75,76 persen masyarakat yang berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan. Sedangkan 24,24 persen masyarakat memilih untuk tidak menggunakan jaminan kesehatan ketika melakukan rawat jalan.

5.2 Penolong Kelahiran

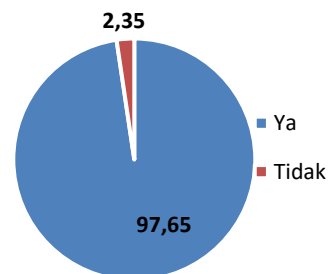
Penolong kelahiran sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses melahirkan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dapat dianggap lebih baik dibandingkan tenaga non medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan yang kurang baik oleh penolong kelahiran dapat mengakibatkan kondisi kesehatan bayi dan ibu menjadi berbahaya seperti terjadinya kejang-kejang, pendarahan pada ibu saat melahirkan maupun kematian ibu dan anak yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun.

Pada Tahun 2021, terdapat 97,65 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Sedangkan 2,35 persen perempuan ketika melahirkan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan (Gambar 5.3). Penolong kelahiran ini dapat dikelompokkan menjadi dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan dukun beranak/paraji.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya memilih penolong kelahiran yang tepat telah dipahami oleh sebagian besar penduduk di Aceh Barat.

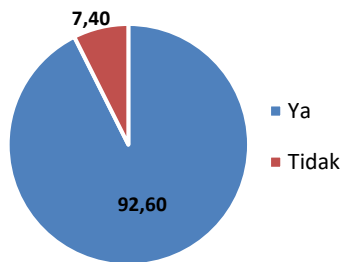
Tingkat kesadaran itu pula yang mendorong sebagian besar penduduk Aceh Barat untuk memilih fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah, swasta, rumah bersalin, klinik, puskesmas, pustu, praktik nakes, polindes/poskesdes sebagai tempat persalinan (92,60 persen). Sebanyak 7,40

Gambar 5.3.
Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dengan Penolong Kelahiran Tenaga Kesehatan di Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Gambar 5.4.
Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

berat kurang dari 2,5 kg dianggap memiliki berat badan di bawah batas normal. Sebanyak 87,10 persen bayi yang dilahirkan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 memiliki berat badan di atas 2,5 kg dan hanya 12,90 persen bayi yang memiliki berat lahir di bawah 2,5 kg.

5.3 Pemberian ASI

Tingkat kecerdasan anak dipengaruhi oleh kualitas makanan yang diberikan pada saat anak tersebut berusia balita dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) sewaktu bayi. ASI merupakan kebutuhan pokok bagi bayi karena mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak, pembentukan tulang serta sebagai alat untuk memerangi penyakit dan melindungi tubuh dari kuman karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi serta mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena itu, semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. ASI eksklusif (pemberian ASI tanpa makanan tambahan sampai usia 6 bulan), dianjurkan oleh para ahli

persen penduduk lainnya memilih persalinan di rumah dengan berbagai alasan (Gambar 5.4.).

Berat badan lahir menjadi barometer kesehatan bayi meski bukan alat ukur sempurna. Berat bayi normal pada kandungan 37-42 minggu adalah 2,5-4 kg. Pada umumnya, bayi yang terlahir dengan

Tabel 5.1.
Persentase Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI, 2021

Indikator	Laki-laki Perempuan	
	(1)	(2)
Balita berumur 0-23 bln	88,09	94,34
Lamanya (bulan)	12,01	12,22

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu sebagai suatu bentuk perwujudan kasih sayang maupun bayi untuk kesehatannya kelak.

Pada Tabel 5.1., terlihat bahwa di Kabupaten Aceh Barat lebih banyak anak perempuan berusia kurang dari 2 tahun yang sempat menikmati pemberian ASI lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Sementara itu, durasi pemberian ASI lebih lama diberikan untuk bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan.

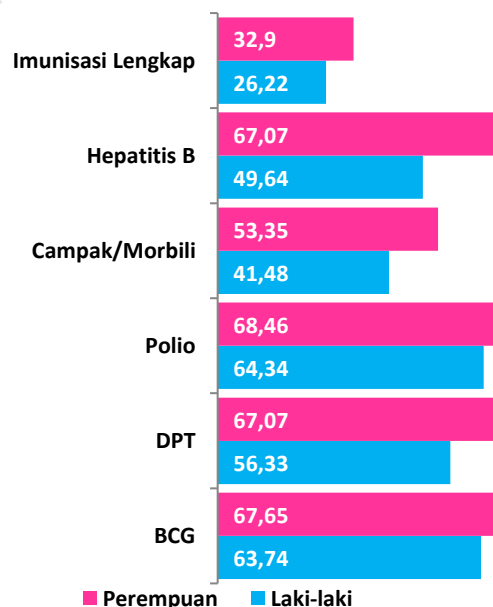
5.4 Imunisasi

Imunisasi saat ini sudah menjadi hal yang wajib untuk diberikan kepada bayi, apalagi pemerintah juga sangat mendukung dengan mencanangkan program pemberian imunisasi dasar lengkap secara gratis. Usia anak-anak merupakan usia paling rentan terhadap berbagai virus dan penyakit. Maka dari itu, sejak dini anak perlu mendapatkan kekebalan tubuh melalui pemberian vaksin atau imunisasi agar terhindar dari penyakit yang mungkin dapat mengakibatkan cacat bahkan kematian.

Pada dasarnya kekebalan pada seseorang terbentuk dalam dua cara, yaitu

kekebalan pasif dan kekebalan aktif. Pada kekebalan pasif, tubuh tidak membentuk sendiri kekebalan tubuhnya, sedangkan pada kekebalan aktif,

Gambar. 5.5.
Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenisnya di Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

tubuh ikut berperan dalam membentuk kekebalan. Keduanya itu sendiri dapat berlangsung secara alami melalui dua cara, yaitu bawaan ataupun didapat dari luar.

Dapat dilihat pada Gambar. 5.5. bahwa lebih banyak balita perempuan yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap dibandingkan balita laki-laki, masing-masing 32,90 persen dan 26,22 persen. Vaksinasi Campak menjadi jenis pemberian imunisasi yang lebih sedikit diberikan dibandingkan vaksin-vaksin lainnya.

<https://acehbaratkab.bps.go.id>

BAB VI PENDIDIKAN



Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu faktor kebutuhan dasar manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Pada tahap tertentu tingkat pendidikan dapat meningkatkan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka melek huruf.

Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana Wajib Belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 menjadi Wajib Belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Diharapkan dengan demikian tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-18 tahun).

6.1 Status Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 4,28 persen pada tahun 2021 dimana persentase perempuan lebih besar dari laki-laki, yaitu masing-masing 6,01 persen dan 2,59 persen (tabel 6.1). Penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di SD/ sederajat sebesar 12,02 persen, dimana persentase

Tabel 6.1.
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kab. Aceh Barat, 2021

Status Pendidikan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	2,59	6,01	4,28
Masih bersekolah di SD/ sederajat	13,21	10,80	12,02
Masih bersekolah SMP/ sederajat	4,88	5,61	5,24
Masih bersekolah di SMA ke atas	7,47	8,47	7,97
Tidak bersekolah lagi	71,85	69,11	70,49
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

laki-laki sebesar 13,21 persen dan perempuan sebesar 10,80 persen. Penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di SMP/ sederajat sebesar 5,24 persen, dimana persentase laki-laki sebesar 4,88 persen dan perempuan sebesar 5,61 persen. Penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di SMA ke atas sebesar 7,97 persen, dimana persentase laki-laki sebesar 7,47 persen dan perempuan sebesar 8,47 persen. Sementara itu, penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,49 persen, dimana persentase laki-laki sebesar 71,85 persen dan perempuan sebesar 69,11 persen.

6.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, kemungkinan untuk dapat memperoleh pekerjaan semakin besar sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan semakin meningkat, sedangkan pengaruh tidak langsung, akan terlihat dari pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi

jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan.

Dapat dilihat pada Tabel 6.2., penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Barat yang berhasil menamatkan pendidikan pada jenjang SD/ sederajat sebesar 22,76 persen pada tahun 2021, sedangkan yang menamatkan pendidikan dari jenjang SMP/ sederajat sebesar 21,65

Tabel 6.2.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kab. Aceh Barat, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak mempunyai ijazah	7,03	8,45	7,73
SD/ sederajat	21,45	24,10	22,76
SMP/ sederajat	23,68	19,56	21,65
SMA ke atas	47,84	47,88	47,86

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

persen. Sedangkan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Barat yang berhasil menamatkan pendidikan pada jenjang SMA ke atas sebesar 47,86 persen dan sisanya 7,73 persen tidak mempunyai ijazah.

6.3 Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 10 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

Tabel 6.3.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca/menulis dan Jenis Kelamin di Kab. Aceh Barat, 2021

Tahun	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Baca Tulis Huruf Latin/ alfabet	99,22	96,16	97,71
Baca Tulis Huruf Arab/ Lainnya	22,83	20,98	21,91

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Hampir seluruh penduduk yang melek huruf memiliki kemampuan baca tulis. Terdapat 97,71 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mampu membaca/menulis huruf latin/alfabet di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 (Tabel 6.3.). Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dapat membaca dan menulis huruf latin/alfabet lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan (99,22 persen terhadap 96,16 persen). Di saat bersamaan, 21,91 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas juga mampu membaca dan menulis menggunakan huruf lainnya.

6.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Sebagai standar, program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai dari APS umur 7-12 tahun lebih dari 95 persen dan APS umur 13-15 tahun lebih dari 70 persen.

Mengacu pada kriteria tersebut, maka program wajib belajar di Kabupaten Aceh Barat telah berhasil karena APS untuk usia 7-12 tahun telah mencapai 99,56 persen, APS untuk usia 13-15 tahun telah mencapai 98,26 persen, sedangkan APS untuk usia 16-18 tahun sebesar 79,29 persen. (Tabel 6.4.). Realisasi APS pada ketiga kelompok umur telah melebihi target 95 persen dan 70 persen.

Tabel 6.4.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kab. Aceh Barat, 2021

Tahun	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	100,00	99,02	99,56
13-15	98,82	97,73	98,26
16-18	74,08	85,19	79,29

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

6.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Hal ini menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

APM untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2021 sebesar 99,56 persen (Tabel 6.5). Hal ini menunjukkan bahwa murid SD yang berumur 7-12 tahun sebanyak 99,56 persen dan selebihnya merupakan murid SD yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Pada jenjang pendidikan SMP, APM sebesar 88,17 persen yang berarti bahwa hanya 88,17 persen penduduk usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SMP/ sederajat dan selebihnya masih duduk di bangku SD ataupun sudah di bangku SMA. Demikian juga dengan APM SMA

yang hanya 71,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 71,89 persen penduduk usia 16-18 tahun yang duduk di bangku SMA sedangkan sisanya masih duduk di bangku SMP ataupun sudah melanjutkan ke perguruan tinggi.

Tabel 6.5.
Angka Partisipasi Murni Menurut
Kelompok Umur di Kab. Aceh Barat, 2021

APM	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	100,00	99,02	99,56
SMP	86,31	89,92	88,17
SMA	67,60	76,74	71,89

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021



BAB VII KELUARGA BERENCANA

Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahteraan. Tujuan umum dari Keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Jika dilihat dari kaca mata medis, terdapat berbagai manfaat menjalankan program keluarga berencana, yaitu:

1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
2. Mengurangi risiko aborsi
3. Menurunkan angka kematian ibu
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Membantu mencegah HIV/AIDS
6. Menjaga kesehatan mental keluarga

7.1 Status Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi

yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga

Pada dasarnya ada dua bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perubahan status dari status belum kawin ke status kawin.
2. Kawin kembali yaitu perubahan dari status cerai menjadi kawin.

Tabel 7.1.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kab. Aceh Barat, 2021

Status Perkawinan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	
Belum Kawin	42,69	31,74	37,28
Kawin	54,31	55,94	55,12
Cerai Hidup/ Mati	2,99	12,32	7,60
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

perempuan, yaitu masing-masing sebesar 42,69 persen dan 31,74 persen. Sementara itu, penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup dan cerai mati sebanyak 12,32 persen. Angka ini lebih besar daripada laki-laki yang hanya 2,99 persen.

Merujuk pada Tabel 7.1., penduduk berumur 10 tahun ke atas yang belum kawin di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 mencapai 37,28 persen, persentase penduduk berstatus kawin sebesar 55,12 persen. Sedangkan penduduk Aceh Barat yang cerai hidup dan cerai mati sebanyak 7,60 persen. Persentase laki-laki yang belum kawin lebih besar dibanding

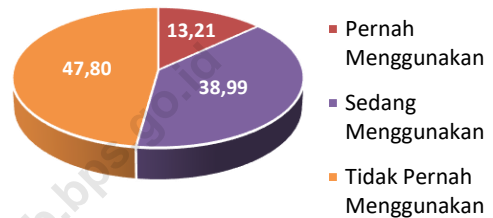
7.2 Wanita Berstatus Kawin dan Alat/Cara KB yang Digunakan

Wanita berumur 15–49 tahun digolongkan sebagai Wanita Usia Subur (WUS), dimana dalam kelompok usia ini, menurut ilmu kesehatan merupakan usia yang paling produktif dalam hal melahirkan anak. Untuk itu Program KB memusatkan sasarannya terhadap wanita yang berada dalam kelompok usia ini, penurunan angka kelahiran merupakan salah satu sasaran Program KB yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Penurunan angka kelahiran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti meningkatnya faktor sosial ekonomi

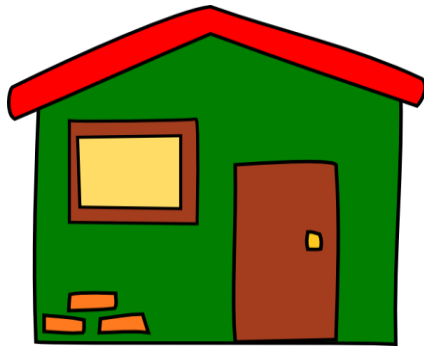
masyarakat, bertambahnya peran wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga sebagai wanita karier, dan lain sebagainya. Namun di Indonesia pada umumnya faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas adalah Program KB.

Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan wanita usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi KB di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Gambar 7.1. Pada tahun 2021, wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan KB sebanyak 38,99 persen sedangkan yang pernah menggunakan namun tidak menggunakan lagi sebanyak 13,21 persen dan yang tidak pernah menggunakan KB sebanyak 47,80 persen.

Gambar 7.1.
Persentase Wanita Berusia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin dan Penggunaan Alat KB di Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021



BAB VIII PERUMAHAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Tanpa tempat tinggal dan tempat berlindung tentunya manusia tidak dapat hidup layak. Rumah juga dapat menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal ini tercermin dari jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan oleh rumah tangga. Selain itu fasilitas air minum, penerangan dan tempat buang air besar turut mencerminkan kesejahteraan masyarakat sebagai kebutuhan dasar manusia.

Tingginya permintaan perumahan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk serta kebutuhan manusia akan kenyamanan dan perlindungan. Hingga saat ini tidak semua rumah tangga memiliki rumah sendiri. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia melalui BTN dan PERUMNAS telah berusaha menyediakan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan cara pembayaran angsuran, walaupun disadari perumahan yang ditawarkan tersebut belum semuanya memenuhi persyaratan kenyamanan bagi yang menghuninya karena keterbatasan dana dan kemampuan pemerintah serta masyarakat itu sendiri. Rumah yang baik bukan saja memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya.

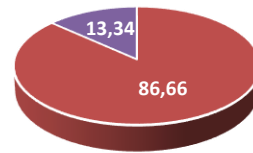
8.1 Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah dapat memberikan indikasi tentang tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu daerah. Apabila sebuah rumah tangga memiliki rumah sendiri maka tingkat kesejahtraannya lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki rumah

sendiri. Akibat tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal maka rumah tangga harus menyewa atau kontrak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan tempat tinggal.

Pada tahun 2021 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat telah menempati rumah milik sendiri yakni sebesar 86,66 persen. Sekitar sepersepuluh rumah tangga masih harus mengontrak ataupun menyewa rumah (13,34 persen) (Gambar. 8.1.).

Gambar 8.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kab. Aceh Barat, 2021



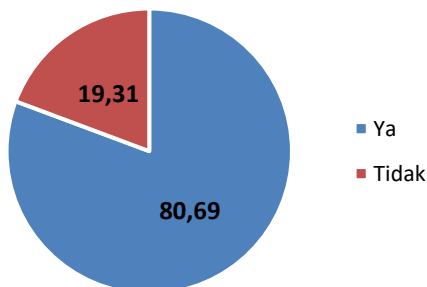
■ Milik sendiri ■ Bukan milik sendiri

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

8.2 Aset

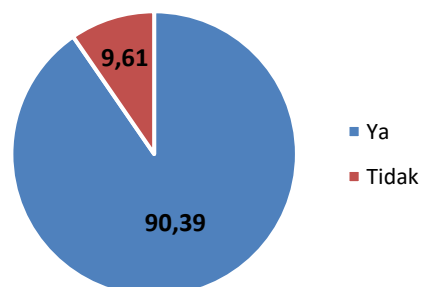
Kekayaan rumah tangga mengacu pada kekayaan bersih rumah tangga, yaitu nilai aset yang dimiliki rumah tangga dikurangi semua kewajibannya. Aset rumah tangga terdiri dari aset keuangan dan aset riil. Aset juga dapat dibagi ke dalam kategori aset produktif dan aset konsumtif. Aset produktif adalah aset yang mampu menghasilkan uang (*return*) ataupun tidak menghasilkannya saat ini namun di masa depan nilainya meningkat. Sebaliknya aset konsumtif tidaklah menghasilkan serta nilainya menurun seiring waktu.

Gambar 8.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Fasilitas Rumah Tangga di Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Gambar 8.3.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Transportasi di Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Pada tahun 2021, lebih dari empat per lima rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat memiliki aset fasilitas rumah tangga (80,69 persen) sebagai aset tetap. Kemudahan pengambilan kredit kendaraan bermotor dengan uang muka dan cicilan yang ringan di Aceh Barat, maka semakin besar aset berupa mobil dan sepeda motor pribadi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset transportasi yang mencapai 90,39 persen. Persentase yang cukup besar ini dipengaruhi oleh kepemilikan sepeda motor, yang kepemilikannya tampak menjadi suatu keharusan tersendiri bagi rumah tangga di Aceh Barat (Gambar 8.3.).

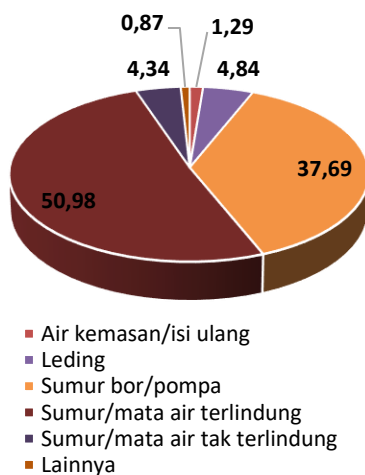
8.3 Sumber Air

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Diperkirakan 15% penggunaan air di seluruh dunia adalah di rumah tangga. Hal ini meliputi air minum, mandi, memasak, sanitasi, dan berkebun. Kebutuhan minimum air yang dibutuhkan dalam rumah tangga menurut Peter Gleick adalah sekitar 50 liter per individu per hari, belum

termasuk kebutuhan berkebun. Air minum haruslah air yang berkualitas tinggi sehingga dapat langsung dikonsumsi tanpa risiko bahaya. Di sebagian besar negara-negara berkembang, air yang disuplai untuk rumah tangga dan industri adalah air minum standar meski dalam proporsi yang sangat kecil digunakan untuk dikonsumsi langsung atau pengolahan makanan.

Penggunaan air isi ulang dan air kemasan bermerek untuk keperluan mandi dan cuci bukan lah

Gambar 8.4.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

pilihan yang ekonomis tentunya. Namun, masih terdapat 1,29 persen rumah tangga yang menggunakan air kemasan/isi ulang untuk mandi/cuci/dll. Air bersih dari PDAM Tirta Meulaboh menjadi pilihan sebagian kecil rumah tangga. 4,84 persen rumah tangga memilih leding sebagai sumber air untuk keperluan mandi/cuci/dll, 50,98 persen memilih sumur terlindung, 37,69 persen rumah tangga menggunakan sumur bor/pompa, 4,34 persen rumah tangga menggunakan sumur tak terlindung, dan sisanya menggunakan sumber mata air lainnya (Gambar 8.4).

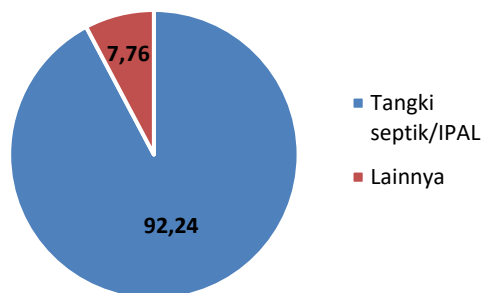
8.4 Tempat Buang Air Besar

Fasilitas penunjang kesehatan suatu rumah selain air minum dan sumber penerangan, tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan merupakan unsur penting dalam mewujudkan kenyamanan dan kesehatan suatu rumah. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik karena kotoran tidak akan mencemari lingkungan di sekitarnya bila jaraknya dari sumber air memenuhi syarat juga. Namun tidak semua rumah mempunyai tempat buang air besar yang baik karena keterbatasan lahan maupun biaya untuk membangunnya. Oleh karena itu masih banyak rumah tangga yang membuang kotorannya ke tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti ke sungai, kolam, sawah ataupun tanah terbuka.

Keadaan ini tentunya perlu mendapat perhatian karena dapat mencemari lingkungan dengan bau dan pencemaran lain yang ditimbulkannya.

Sanitasi rumah tangga yang baik merupakan salah satu ciri rumah tangga yang sehat, tempat pembuangan akhir tinja yang baik merupakan gambaran sanitasi

Gambar 8.5.
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susena 2021

rumah tangga yang baik. Pada Gambar 8.5, terlihat bahwa tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan oleh rumah tangga sebagian besar adalah tangka septik/IPAL, yaitu sebanyak 92,24 persen. Sedangkan 7,76 persen rumah tangga melakukan pembuangan akhir tinja ke tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti ke sungai, kolam, sawah ataupun tanah terbuka.

Jenis kloset leher angsa merupakan jenis kloset terbaik ditinjau dari aspek kesehatan karena kloset jenis leher angsa mampu menahan bau yang dapat dikeluarkan oleh kotoran manusia. Pada Tahun 2021 sebanyak 96,91 persen rumah tangga di Aceh Barat menggunakan kloset jenis leher angsa sedangkan 3,09 persen rumah tangga lainnya menggunakan plengsengan dengan tutup atau tanpa tutup atau cubluk.



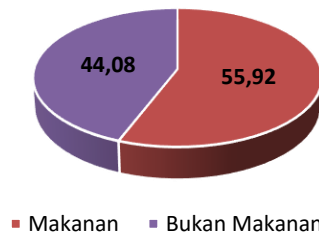
BAB IX KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi.

Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar (mendekati 50 persen) dari total

Gambar 9.1.
Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita
Sebulan Kelompok Makanan dan Non
Makanan di Kab. Aceh Barat, 2021

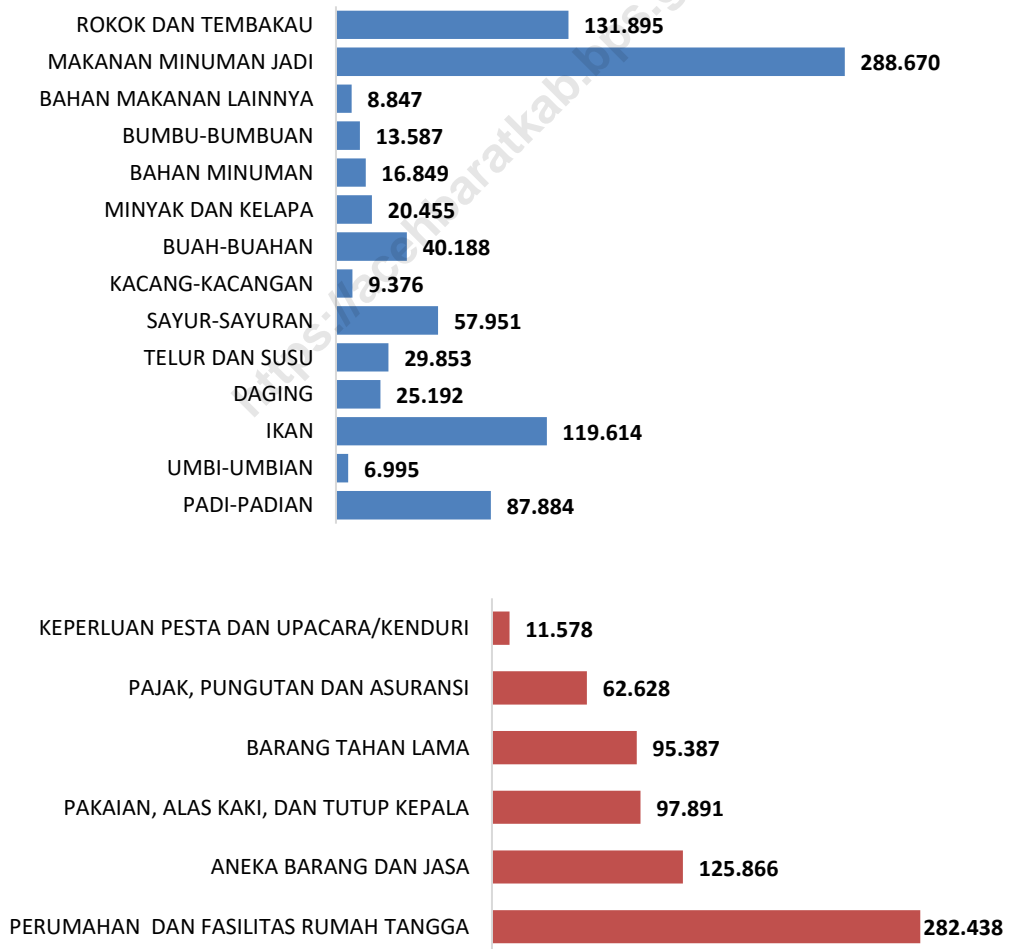


Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

pengeluaran perkapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran perkapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah bagian terbesar dari pengeluaran perkapita.

Pada tahun 2021, perbandingan komposisi pengeluaran makanan dan bukan makanan di Kabupaten Aceh Barat sedikit berbeda dimana pengeluaran makanan sebesar 44,08 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 55,92 persen (Gambar 9.1).

Gambar 9.2.
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kab. Aceh Barat (Rupiah), 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

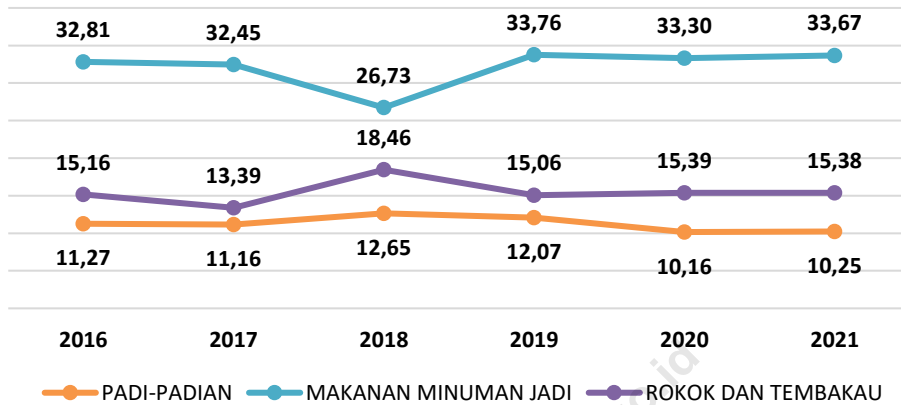
9.1. Pengeluaran Konsumsi Kelompok Makanan

Banyak faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga. Menurut Hattas, faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi, di antaranya adalah : (1) Tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendapatan biasanya sebanding dengan tingkat konsumsi yang tinggi; (2) Selera konsumen, orang berbeda akan memiliki keinginan yang berbeda dan akan memengaruhi pola konsumsi; (3) Harga barang, kenaikan harga berbanding terbalik dengan permintaan akan suatu barang; (4) Tingkat pendidikan masyarakat, berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsi; (5) Jumlah keluarga. Besar kecilnya jumlah keluarga akan memengaruhi pola konsumsinya; (6) Lingkungan. Keadaan dan kebiasaan lingkungan akan memengaruhi perilaku konsumsi pangan masyarakat setempat.

Bagi masyarakat Aceh Barat khususnya di Meulaboh telah terjadi pergeseran pola pengeluaran konsumsi perkapita. Gaya hidup yang ingin instan tanpa perlu menghabiskan waktu dan tenaga serta didukung oleh kemudahan sistem pelayanan pembelian melalui pesan antar secara daring/*online* telah menyebabkan pengeluaran makanan dan minuman jadi semakin meningkat.

Dapat dilihat pada Gambar 9.3, pengeluaran perkapita perbulan untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi cenderung terus meningkat selama enam tahun terakhir kecuali di tahun 2018. Bila di tahun 2016 seorang penduduk di Kabupaten Aceh Barat baru mengalokasikan 32,81 persen bagian dari pengeluaran perkapita perbulannya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi, alokasi ini meningkat menjadi 33,67 persen di tahun 2021. Secara spesifik, peningkatan terbesar tampak di tahun 2019. Peningkatan yang terjadi sampai 0,95 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terjadi karena mulai beroperasinya salah satu operator transportasi *online* lokal yang salah satu pelayanan yang diberikan adalah layanan antar pembelian *online*, suatu bentuk kerjasama antar operator transportasi *online* dengan berbagai warung/kedai/restoran makanan dan minuman.

Gambar 9.3.
 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Komoditas
 Makanan Terpilih di Kab. Aceh Barat, 2016-2021



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2017-2021 dan Susenas 2021

Pada periode yang sama, konsumsi padi-padian (padi, jagung, ubi, tepung) justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Patut diduga alokasi untuk jenis komoditas makanan telah bergeser menjadi pengeluaran makanan dan minuman jadi. Sementara pengeluaran konsumsi rokok dan tembakau cenderung fluktuatif. Proporsi konsumsi rokok ini secara umum di tiap tahunnya lebih besar dibandingkan dengan konsumsi padi-padian. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh Barat khususnya penduduk laki-laki cenderung lebih banyak menghabiskan uangnya untuk merokok dibandingkan untuk keperluan makanan seperti nasi, jagung, ubi atau tepung.

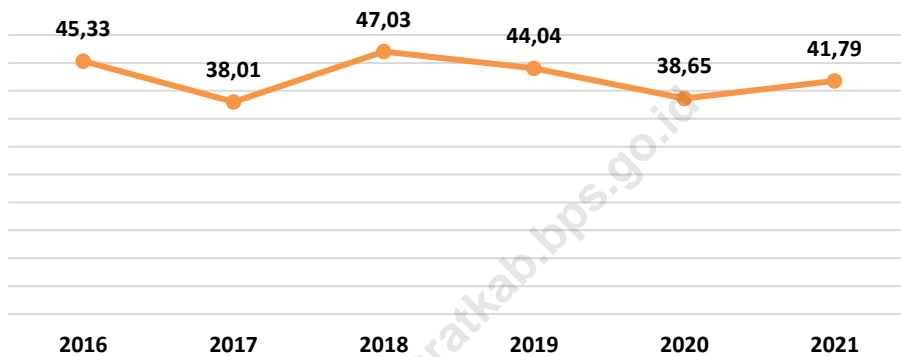
9.2. Pengeluaran Konsumsi Kelompok Non Makanan

Sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita, pola konsumsi berubah sehingga : (1) Pengeluaran rumahtangga untuk bahan makanan dan pakaian turun; (2) Belanja untuk barang konsumsi tahan lama meningkat; (3) Pengeluaran untuk jasa meningkat; (4) Pengeluaran untuk *leisure* meningkat.

Pengeluaran Konsumsi Non Makanan biasanya mengalami kenaikan sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tingginya proporsi

pengeluaran untuk non makanan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan semakin membaik. Pengeluaran untuk makanan memiliki limitasi karena tidak mungkin perut seseorang terus bertambah seiring kenaikan pendapatan.

Gambar 9.4.
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok
Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga
di Kab. Aceh Barat, 2016-2021



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2017-2021 dan Susenas 2021

Kelompok pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan kelompok yang paling dominan menyumbang pengeluaran perkapita sebulan bukan makanan. Kebutuhan pengeluaran masyarakat Kabupaten Aceh Barat terhadap perumahan dan fasilitas rumah tangga dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tercatat di tahun 2016 pengeluaran per kapita untuk komoditas tersebut adalah 45,33 persen yang selanjutnya turun menjadi 38,01 persen. Namun di tahun 2018 kebutuhan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga berada di puncak tertinggi yaitu sebesar 47,03 persen dan di tahun 2021 proporsinya turun drastis menjadi 41,79 persen.

BAB X KEMISKINAN



Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya.

Dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

10.1 Garis Kemiskinan

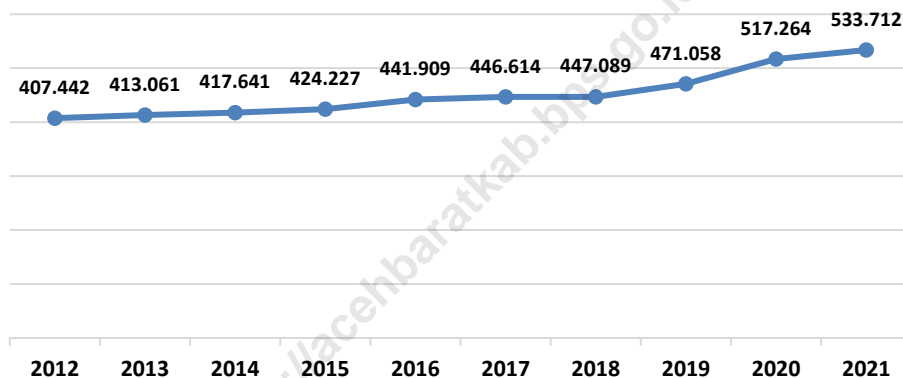
Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis Kemiskinan menurut BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Non-Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per

kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Gambar 10.1.
Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat (Rupiah), 2012-2021



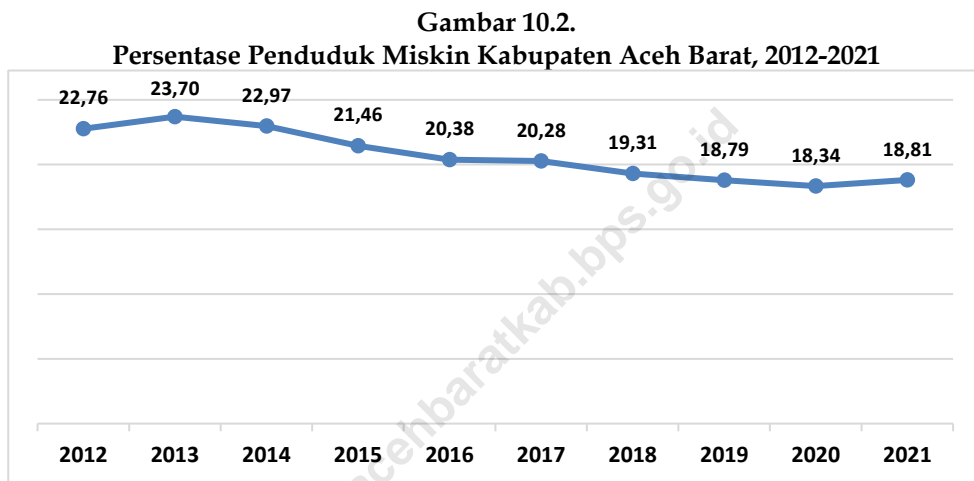
Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 garis kemiskinan sebesar Rp. 407.442,-. Selama kurun waktu sepuluh tahun, garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 533.712,- pada tahun 2021. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan minimum perkapita perbulan yang harus dicapai penduduk untuk dapat hidup layak di Kabupaten Aceh Barat adalah sebesar Rp. 533.712,- pada tahun 2021 (Gambar 10.1.).

Meningkatnya garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Untuk memperoleh standar hidup yang layak maka daya beli masyarakat tidak boleh turun. Agar daya beli masyarakat tidak turun maka pendapatan harus naik sehingga garis kemiskinan juga naik.

10.2 Persentase Kemiskinan

Konsep kemiskinan menurut BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Persentase penduduk miskin selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 2012, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat sebesar 22,76 persen. Persentase penduduk miskin terus mengalami kenaikan setahun kemudian menjadi 23,70 persen. Selanjutnya mulai tahun 2014 hingga 2020, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 22,97 persen menjadi 18,34 persen. Kemudian sedikit meningkat di tahun 2021 menjadi 18,81 persen (Gambar 10.2).



BAB XI SOSIAL EKONOMI LAINNYA

Keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, antara lain rumah tangga yang mendapat pelayanan kesehatan gratis, pemberian bantuan tunai pendidikan terkait Program KIP (Kartu Indonesia Pintar), bantuan non tunai KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) untuk keluarga kurang mampu dan bantuan kredit usaha.

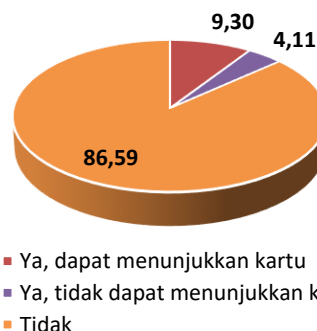
11.1 Perlindungan Sosial

11.1.1 Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah harus terlibat dalam menyejahterakan warga negaranya.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu penanda bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu diantaranya penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan/ bantuan sosial dan berada didalam panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),

Gambar 11.1.
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Keluarga Sejahtera di Kab. Aceh Barat, 2021



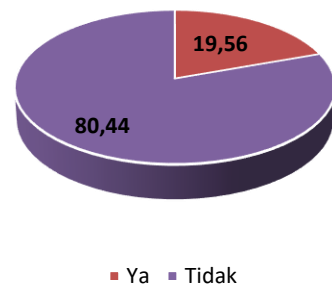
Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

gelandangan dan pengemis yang tinggal dikolong jembatan serta tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni, korban penyalahgunaan napza dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penerbitan kartu keluarga sejahtera merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Meski demikian, 86,95 persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat mengaku tidak menerima Kartu Keluarga Sejahtera (Gambar 11.1.).

11.1.2 Jaminan Pendidikan

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP

Gambar 11.2.
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar di Kab. Aceh Barat, 2021



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pada tahun 2021, Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat tidak menerima PIP. Hanya terdapat 19,56 persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat yang menerima PIP.

11.2 Teknologi Informasi

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat akan komunikasi dan akses informasi semakin berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia menggunakan berbagai jenis sarana komunikasi seperti surat, email, telepon, internet, dll. Perbedaan ruang dan waktu tidak lagi menghambat seseorang untuk memperoleh informasi. Kini

kita dapat tetap saling terhubung tidak peduli belahan dunia manapun kita berada.

Gaya hidup modern menuntut kita untuk selalu terhubung dengan lingkungan sekitar, terutama melalui internet. Wajar bila perangkat elektronik seperti laptop dan telepon genggam pribadi dengan fitur yang canggih menjadi kebutuhan pada masa kini bagi mereka yang mengadopsi gaya hidup modern.

Melalui internet, mereka yang mengadopsi gaya hidup modern dapat dengan leluasa mencari sekaligus mendapatkan informasi mengenai peristiwa penting yang terjadi di dunia ataupun topik perbincangan terkini yang perlu diketahui.

Tabel 11.1.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Penggunaan Telepon Seluler/Komputer, dan Mengakses Internet di Kab. Aceh Barat, 2021

Tahun	L	P	Total
(1)	(4)	(5)	(6)
Menggunakan telepon seluler/komputer	76,83	72,48	76,26
Mengakses internet	54,63	52,60	54,37

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, diolah dari hasil Susenas 2021

Pada tahun 2021, terdapat 76,26 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat yang berumur 5 tahun ke atas telah mengaku telah menggunakan telepon seluler/computer. Sedangkan 54,37 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas telah pernah mengakses internet. Akses internet tentunya dapat

dilakukan melalui telepon seluler ataupun komputer (Tabel 11.1.).

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH BARAT**

BPS - Statistics of Aceh Barat Regency

Jl. Sisingamangaraja No.2 Meulaboh

Telp. : (0655) 7553330 Email : bps1107@bps.go.id

Homepage : <http://www.acehbaratkab.bps.go.id>